BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS

A. Kajian Kepustakaan Konseptual

1. Kajian Tentang Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dimaksud sebelumnya adalah pendampingan, maka istilah tersebut dimengerti sebagai proses perubahan diri dari masyarakat secara partisipatif menuju kesejahteraan dan kemandirian.[1]

Menurut Paul dalam buku Harry Hikmat mendefinisikan pemberdayaan dan partisipasi itu merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Salah satu agen internasional, Bank Dunia misalnya, percaya bahwa partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di dunia ketiga merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat terpiskin melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri.[2]

Ada pula yang mendefinisikan pemberdayaan adalah suatu konsep ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, meningkatkan

---

[1] M. Nadhir, *Memberdayakan Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat*, (Sidoardjo: Yapsem, 2009), hal. 1

[2] Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Press, 2006), hal. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.[3]

Pemberdayaan sebenarnya pengertian secara harfiah bisa diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak bergantung.

Sementara Swift dan Levin mengatakan pemberdayaan menunjuk pada usaha melalui pengubahan struktur sosial. Sedangkan Rappaport mengungkapkan pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat mampu menguasai kekuasaan kehidupannya. Selanjutnya Craig dan Mayo mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep-konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan pemerataan.[4]

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah mengembangkan partisipasi masyarakat miskin yaitu berkembangnya sikap, pengetahuan, dan keterampilan berusaha agar mampu meningkatkan kemandiriannya dan kesejahteraannya.[5]

Sedangkan tujuan pemberdayaan yang lain adalah agar masyarakat itu merasa perlu dilibatkan dalam membangun, merasa berperan dalam menentukan nasibnya sendiri, dan lebih dari itu akan

---

[3] Hari Witono Suparlan dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Modul Para Aktivis Masyarakat*,(Sidoardjo: Paramulia Press, 2006), hal. 1

[4] Abu Huraerah. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Pr_ss,2008), hal. 82

[5] M. Nadhir, *Memberdayakan...., hal. 1*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki harapan masa depannya sendiri sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.[6]

c. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa-sedarah dengan aliran yang muncul pada abad ke-20 yang lebih 'ikenal dengan aliran post-modernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang di aplikasikan pada dunia kekuasaan. Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara. Parson menyatakan bahwa konsep power dalam masyarakat adalah variable jumlah atau kekuatan dalam masyarakat secara keseluruhan yang selanjutnya memiliki tujuan yang kolektif, misalnya dalam pembangunan ekonomi.[7]

d. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dubois dan Miley dalam buku Abu Hurairah memberi beberapa prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam pemberdyaan masyarakat:

1. .Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri,

---

[6] Hari Witono Suparlan dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Modul Para Aktivis Masyarakat*, hal. 4

[7] Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Press, 2006), hal. 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien.

2. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, dan menjaga kerahasiaan klien.
3. Dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar, dan melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan social melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan professional, riset, dan perumusan kebijakan, dan penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu public, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.[8]

Beberapa prinsip pemberdayan yang ridak boleh dilupakan:

a. Pemberdayaan merupakan proses penguatan dan penyadaran diri
b. Keyakinan bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk berkembang

[8] Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Press,2008), hal. 93-94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kegiatan dan pendekatan pemberdayaan bermaksud menciptakan situasi yang mendukung perkembangan masyarakat

d. Pendekatan pemberdayan berangkat dari lapisan paling bawah

e. Pemberdayaan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya

f. Pemberdayaan dilakukan melalui kelompok atau lembaga yang berkelanjutan

g. Pemberdayaan memprioritaskan pada partisipasi, serta memperhatikan aspek lingkungannya

h. Berorientasi pada penguatan kepekaan gender dalam proses pengambilan kebijakan dilingkungannya.[9]

e. Model Pemberdayaan Masyarakat

1. Pendampingan secara langsung, yaitu fasilitator tinggal dilokasi kelompok atau masyarakat yang akan dikembangkan. Model ini biasa diterapkan pada tahap penumbuhan kelompok atau tahap animasi, karena pada kelompok yang sedang tumbuh memerlukan banyak bimbingan, konsultasi, dan informasi.

2. Pendampingan Berkala, yaitu fasilitator datang ke kelompok atau masyarakat pada waktu-waktu tertentu yang telah disepakati dan tinggal beberapa waktu bersama masyarakat. Model ini diterapkan pada kelompok yang sudah cukup berkembang, fasilitator bersama

[9] M. Nadhir, *Memberdayakan*...., hal. 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat melakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan, mwngidentifikasi permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya, menyusun rencana kegiatan untuk waktu yang akan datang.[10]

f. Unsur Pemberdayaan Masyarakat

1. Pendamping

Pendamping adalah bagian dari komponen lembaga, instansi atau dunia usaha dalam proses pemberdayaan, maka pendamping berkewajiban:

a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan pemberdayaan.
b) Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk memperlancar proses penguatan masyarakat lokasi program dan sekitarnya.
c) Menyusun konsep dan materi atau bahan pembelajaran untuk kegiatan penguatan kapasitas.[11]

2. Kegiatan Pemberdayaan

a) Pendampingan
b) Usaha kesejahteraan sosial, yaitu kegiatan yang secara berkelanjutan dan mandiri melayani masyarakat miskin dengan

[10] M. Nadhir, *Memberdayakan*...., hal. 11-12
[11] Ibid, hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem sosial yang ada lembaga sosial pengelola pembiayaan program dan operasional.[12]

g. Pendekatan Pembangunan Berpusat pada Rakyat (*People Centered Development Approach*)

Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan, yakni menekankan kenyataan pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan dan posisinya dalam tata ekonomi internasional.[13]

Menurut Korten dan Carner dalam buku Harry Hikmat menyatakan bahwa konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Tiga tema penting yang dianggap sangat menentukan bagi konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu:

1. Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Kesadaran bahwa sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sector tradisional

[12] Ibid, hal. 6-7
[13] Harry Hikmat, *Strategi.....*, hal. 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin.

3. Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.[14]

Tujuan pembangunan sosial menurut Komisi Sosial dan Ekonomi untuk Asia dan Pasifik pada dasarnya tujuannya adalah mengembangkan taraf hidup masyarakat, dan pembangunan sosial sesungguhnya menekankan pada pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. [15]

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat telah menempatkan dirinya sebagai pendekatan yang banyak dianut dan mewarnai berbagai kebijakan pembangunan masyarakat. Pendekatan ini dalam banyak hal dapat dilihat sebagai operasionalisasi dari perspektif atau paradigm pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dalam pendekatan ini, masyarakat sampai pada tingkat komunitas terbawah diberi peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dalam menikmati hasil pembangunan.[16]

---

[14] Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, hal. 92
[15] Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, hal. 28
[16] Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.65-67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian Cabe Jamu (Pepper Retro Factrum)

Cabe jamu mempunyai bentuk yang kecil, agak panjang, hitam dan bergerigi. Manfaat dari cabe jamu ini adalah untuk mengurangi sakit flu, pusing, dan badan panas-dingin. Tanaman cabe jamu dipanen sekitar 3-4 bulan sekali dan setiap satu tahun sekali ada panen raya. Kemudian hasil dari cabe jamu dijual ke kota maupun ke pengusaha jamu yang mendatangi desa tunggun Jagir untuk mengambil langsung bahan baku pembuat jamu. Harga cabe jamu bervariasi tergantung jenis yaitu basah dan kering. Harga cabe jamu basah sekitar Rp.3.500,-/kg dan cabe jamu kering bisa mencapai sekitar Rp.7.000,-/kg. Dan harga cabe jamu tidak tentu tiap tahun.

Tanaman cabe jamu tidak memerlukan perawatan khusus karena cabe jamu ini tumbuh merambat dengan sendirinya. Tanaman ini hanya memerlukan air agar dapat bertahan hidup hingga menghasilkan cabe jamu yang dapat mendatangkan beberapa manfaat dengan mengolah cabe jamu menjadi jamu yang banyak dijual di pasaran kota besar. Misalnya jamu cabe-puyang. Di samping itu, tanaman cabe jamu juga dapat dimanfaatkan sebagai viagra laki-laki dengan mencampurkannya dengan ramuan-ramuan tradisional. Ramuan ini banyak dimanfaatkan penduduk setempat bahkan para pejabat di instansi terkait pun juga memanfaatkan ramuan tradisional ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kajian Tentang Kelompok Swadaya Masyarakat

a. Pengertian Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok swadaya masyarakat adalah sekumpulan orang secara sukarela yang bekerjasama dalam pemberdayaan sosial ekonomi kerakyatan, atas dasar prinsip dari-oleh dan untuk keadilan dan kesejahteraan anggota.[17]

Kelompok swadaya mempunyai gagasan makna yang subjektif bagi yang memprakarsai. Subjektif dalam keadaan sosial yang sudah terbiasa untuk tidak bertanya, mempersoalkan dimensi keswadayaan dalam proses perubahan sosial yang berlangsung. Dan kelompok swadaya masyarakat sudah menjadi kondisi kemasyarakatan jika arti dari kelompok tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.[18]

Lembaga swadaya masyarakat sebagai orgsnisasi masyarakat yang berangkat dari motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran solidaritas sosial.[19]

Masih amat banyak warga yang masyarakat yang hidup serba kekurangan. Secara sendiri-sendiri, tidak mudah bagi mereka untuk mengembangkan kehidupan ekonomi keluarganya. Keterbatasan pengetahuan, kelangkaan sumberdaya, sempitnya peluang, membelenggu mereka tetap dalam kemiskinan. Kerjasama dan

---

[17] M. Nadhir, *Memberdayakan....*, hal. 34

[18] Soetjipto Wirosardjono, *Pengembangan Swadaya Nasional*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hal. 37

[19] Loekman Soetrisno dkk, *Pembangunan Desa Dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hal. 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling membantu, terbukti dapat memperkuat posisi mereka, meningkatkan kepercayaan diri dan kepercayaan orang lain. Saling tolong menolong dan bekerjasama memperkuat pemupukan sumber pelayanan ekonomi dan memperluas kesempatan untuk mencapai kemajuan.[20]

b. Prasyarat Pendirian Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok swadaya masyarakat yang bercirikan adanya sekelompok orang yang saling mengenal dan bersepakat untuk saling membantu satu sama lain akan lahir jika syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu:

1. Adanya ikatan pemersatu yang jelas, yaitu adanya kesamaan tempat tinggal yang sama, kesamaan tempat pekerjaan, kesamaan jenis pekerjaan, kesamaan hobi atau keinginan, kesamaan organisasi, kesamaan tempat asal, kesamaan ststus.
2. Adanya kesamaan kebutuhan ekonomi dan tujuan tertentu, seperti kebutuhan modal usaha, kebutuhan bahan baku atau barang dagangan, kebutuhan sarana tempat usaha, kebutuhan kelancaran penjualan barang produksi atau jasa.
3. Adanya pemrakarsa atau kelompok kecil orang inti yang memiliki peranan berpengaruh dan dipercaya orang lain disekelilingnya.

[20] *M. Nadhir, Memberdayakan....*, hal. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ada orang yang dengan sukarela bersedia mengelola dan melakukan kegiatan pelayanan kepada para anggota.
5. Ada lembaga maupun perorangan yang memberikan bimbingan dalam pengembangan program kegiatan kepada kelompok.[21]

Dalam kelompok swadaya masyarakat, para anggotanya dituntut untuk berperan aktif dalam pengembangan kelompok agar sesuai dengan tujuan awal pembentukan kelompok yaitu peningkatan kesejahteraan hidup. Dalam kelompok swadaya masyarakat ini pula keputusan dapat di amdil bersama sebagai hasil dari musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga permasalahan yang dihadapi bersama terpecahkan dan kelompok swadaya masyarakat ini akan dapat berkembang.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah dengan mengembangkan potensi swadaya dan keswadayaan yang ada melalui kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pembangunan yang mendasarkan diri pada keswadayaan dapat dilihat sebagai jalan keluar untuk meningkatkan pendapatan, mengatasi kesenjangan, dan sekaligus meningkatkan partisipasi wong cilik dalam pembangunan. Keswadayaan akan lebih efektif apabila masyarakat mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok swadaya masyarakat.

---

[21] M. Nadhir, *Memberdayakan.*, hal. 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kajian tentang peran kelompok swadaya masyarakat dalam konteks pemberdayaan

Ada lima program pengembangan yang dapat disusun untuk mendorong keberhasilan kelompok swadaya masyarakat, yaitu: pertama, program pengembangan sumberdaya manusia, pelatihan dan pendidikan untuk anggota dan pengurus. Kedua, pengembangan kelembagaan kelompok, dengan menyusun peraturan rumah tangga, mekanisme organisasi atau kepengurusan. Ketiga, pemupukan modal swadaya. Keempat, pengembangan usaha baik produksi maupun pemasaran. Kelima, penyediaan informasi tepat guna sesuai dengan kebutuhan kelompok.[22]

Keompok sebagai wadah mengaktualisasikan diri warga masyarakat pedesaan menyebabkan mereka merasa erlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan mereka dalam pembangunan tidak lagi pasif, tetapi menjadi aktif karena telah turut berusaha dalam berbagai kegiatan produktif yang memberikan andil dalam sistem perekonomian yang lebih luas. Peran kelompok swadaya merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan, dan ingin mengembangkan kemandirian masyarakat yang lebih besar, berskala nasional. Maka membina masyarakat dengan pengertian mengayomi, mendukung, dan memberikan kemudahan.[23]

---

[22] Soetjipto Wirosardjono, *Pengembangan....*, hal. 89
[23] Ibid, hal. 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kajian Tentang Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Definisi koperasi secara umum adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.[24]

b. Landasan, Azas dan Tujuan Koperasi

a. Landasan dan azas koperasi umumnya terdiri dari tiga hal sebagai berikut:

i. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.

ii. Semua ketentuan atau tat tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang ini disebut sebagai landasan struktural.

iii. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan

[24] G. Karta Sapoetra dkk, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.

Tujuan koperasi pada garis besarnya adalah memajukan kesejahteraan anggotanya, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.[25]

c. Fungsi Koperasi

a. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
b. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
d. Sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.[26]

d. Prinsip Koperasi

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 UU No. 25/1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

---

[25] Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.21-22
[26] G. Karta Sapoetra dkk, *Koperasi Indonesia*, hal.8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal.

e. Kemandirian.[27]

e. Ciri-ciri Koperasi

1. Dilihat dari segi pelakunya

Koperasi ialah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, yang secara sukarela menyatukan dirinya didalam koperasi. Dengan latar belakang seperti itu, maka koperasi pada dasarnya adalah suatu bentuk perusahaan alternatif, yang didirikan warga masyarakat berekonomi lemah, yang karena keterbatasan ekonominya, tidak mampu melibatkan diri dalam kerjasama ekonomi melalui bentuk-bentuk perusahaan selain koperasi.

Koperasi didirikn sebagai media untuk menjalin kerjasama ekonomi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbtas, dengan pelaku ekonomi lain yang lebih kuat. Dengan demikian, memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk menjadi bentuk perusahaan yang tumbuh dan mengakar pada masyarakat lapisan bawah.

---

[27] Subandi, *Ekonomi Koperasi*, hal, 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dilihat dari tujuan usahanya

Tujuan usaha koperasi pada dasarnya ialah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi secara keseluruhan. Untuk menyediakan kebutuhan pokok para anggotanya.

3. Dilihat dari segi hubungan dengan negara

Dari segi historis, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mengakar pada masyarakat lapisan bawah. Dari segi ekonomi keberadaan koperasi akan sangat membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil.[28]

6. Kajian Tentang Modal Sosial

a. Pengertian modal sosial

Pandangan para pakar yang mendefinisikan mengenai konsep modal sosial (*social capital*) dapat dikategorikan kedalam dua kelompok. Kelompok pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial(*social network*), menurut pendapat Pennar dalam buku Abu Hurairah yang mendefinisikan konsep modal sosial adalah mempengaruhi perilaku individu dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itulah yang dinamakan konsep modal sosial sebagai jaringan hubungan sosial.[29]

---

[28] Subandi, *Ekonomi Koperasi*, hal, 25-26
[29] Abu Hurairah, *Pengorganisasian.....*, hal. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut kelompok kedua mendefinisikan konsep modal sosial yang diwakilkan oleh Francis Fukuyan dalam buku Abu Hurairah bahwa modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai dan norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Jadi modal sosial menurut pendapat kelompok kedua ini lebih memfokuskan karakteristik (*traist*) yang melekat pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.[30]

Ada pula unsur-unsur modal sosial adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam suatu jaringan

   Modal sosial akan kuat bergantung pada kapasitas yang ada pada kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya.

2. Reciprocity

   Modal sosial senantiasa diwarnai dengan kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri.

3. Trust

   Trust atau sikap rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa akan

[30] Abu Hurairah, *Pengorganisasian.....*, hal. 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung.

4. Norma Sosial

Yaitu suatu bentuk hak sosial mengontrol yang disertai adanya bentuk sanksi-sanksi yang dapat membentuk perilaku yang patut.[31]

b. Peran Pemerintah dalam pembangunan modal sosial dan teori kegagalan pemerintah dalam melakukan pengembangan modal sosial

Isu lemahnya kapasitas pemerintah dinegara-negara yang sedang berkembang yang ditandai dengan ketidakmampuan menjalankan pembangunan. Teori-teori kegagalan pemerintah yang dicirikan dengan penekanan pendekatan top-down, maupun teori modal sosial yang dicirikan dengan pendekatan butom-up, keduanya menjadi landasan kerangka dasar untuk mengidentifikasi gejala-gejala yang ada.

Ada beberapa teori tentang tipologi kegagalan pemerintah yang pernah dikemukakan oleh O'Dowd, Weisbrod, Dollery dan Wallis dalam bukuErnan Rustiadi dkk, mengemukakan bahwa penyebab kegagalan tersebut dibagi dalam tiga faktor utama, yakni: pertama, disebabkan oleh inefisiensi dan sistem atau struktur politik yang asimetrik. Politisi yang mementingkan kelompok, terutama untuk pemenangan pemilu yang akan datang,

[31] Ernan Rustiadi dkk, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah,* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 453

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga tidak lagi memikirkan kepentingan dan perbaikan-perbaikan kondisi kemasyarakatan. Kedua, disebabkan karena terhenti atau tersendatnya kegiatan pelayanan masyarakat yang berakibat inefisiensi. Yang ketiga, intervensi pemerintah sering disertai dengan kepentingan pribai dan kelompok. Secara umum lebih dikatakan bahwa penyebab utama kegagalan pemerintah disebabkan karena public sector selalu dipandang sebagai vertikal sektor, sehingga timbul rantai birokrasi yang panjang dalam pelayanan masyarakat.[32]

B. Kajian Penelitian Terkait

Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama, sebelumnya ada skripsi yang pembahasannya tentang peran GAPOKTAN dalam melakukan pemberdayaan petani oleh Fatma Ernawati yang berjudul *Peran GAPOKTAN dalam Pemberdayaan Petani Padi di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoardjo*. Pembahasan dalam skripsi tersebut tentang peran-peran GAPOKTAN dalam melakukan pemberdayaan petani padi serta proses-proses pemberdayaan yang dilakukan oleh GAPOKTAN dalam memberdayakan petani padi.

Namun, pada skripsi kali ini yang membedakan adalah, yang melakukan pemberdayaan adalah kelompok swadaya masyarakat, dalam hal ini bentuk kelompok swadayanya adalah koperasi simpan pinjam. Dan yang menjadi obyek dalam pemberdayaan kelompok swadaya masyarakat koperasi simpan pinjam tersebut adalah petani cabe jamu, bukan petani padi.

---

[32] Ernan Rustiadi dkk, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 458-460

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id